

PENGARUH UPAH MINIMUM PROVINSI, PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA

Nadia Islami, Ali Anis

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang
Nadiaislami28@gmail.com

Abstract: *This research aims to examine the impact of provincial minimum wage, education and health on poverty in Indonesia with the selected model is the Fixed Effect Model (FEM). The data used is panel data during the period 2012-2017, with the technique of collecting documentation data and library studies obtained from relevant institutions and agencies. The variables used are poverty, provincial minimum wage, education and health. The research method used is Ordinary Least Square (OLS). The estimation results show that, provincial minimum wage has a positive and significant effect on poverty in Indonesia. Education has a negative and significant effect on poverty in Indonesia. Health has a negative and its not significant effect on poverty in Indonesia. Meanwhile simultaneously province minimum wage, education and health affect the poverty in Indonesia.*

Keywords: *Poverty, Provincial Minimum Wage, Education, Health and Ordinary Least Square (OLS)*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh upah minimum provinsi, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan model terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Data yang digunakan adalah data panel selama periode 2012-2017, diperoleh dari lembaga dan instansi yang terkait. Variabel yang digunakan adalah Kemiskinan (Y), Upah Minimum Provinsi (X1), Pendidikan (X2), Kesehatan (X3). Metode Penelitian yang dipakai yaitu: *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil estimasi memperlihatkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, sedangkan kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Secara bersama-sama upah minimum provinsi, pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci : Kemiskinan, Upah Minimum Provinsi, Pendidikan, Kesehatan, dan *Ordinary Least Square* (OLS).

Kemiskinan merupakan masalah utama yang menjadi fokus perhatian pemerintah di Indonesia. Dampak dari kemiskinan ini adalah Indonesia masih tergolong negara berkembang dan mengakibatkan terhambatnya pembangunan di Indonesia.

Untuk menentukan tingkat pendapatan serta kebutuhan sandang dan pangan ekonom menggunakan sebuah konsep yaitu konsep kemiskinan absolute. (Todaro dan Smith, 2006).

Jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2009 yakni sebesar 6,96 persen. Penyebab turunnya angka kemiskinan ini adalah pengeluaran per kapita per bulan untuk rumah tangga lapisan terbawah terus tumbuh dan bantuan sosial dari pemerintah yang terus meningkat. Peningkatan upah buruh dan harga eceran beberapa bahan pokok juga menjadi penyebab turunnya angka kemiskinan (Detik finance, 17 Juli 2018).

Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali mengalami peningkatan sebesar 1,11 persen. Peningkatan ini terjadi karena kenaikan harga bahan bakar minyak pada November 2014, inflasi periode September 2014 ke Maret 2015 terekam tinggi, dan harga beras juga mengalami peningkatan. Faktor lain yang menyebabkan kemiskinan meningkat pada tahun ini disebabkan oleh lesunya perekonomian global yang mengakibatkan produksi pangan menurun sehingga menyebabkan harga barang-barang naik yang mengakibatkan inflasi meningkat. Dan berpengaruh kepada konsumsi rumah tangga yang menurun. (Kompas, 7 Februari 2016).

Kemiskinan dapat diatasi melalui upaya peningkatan pendapatan. Bagi penduduk yang bekerja sebagai pekerja, produktivitas pekerja dapat ditingkatkan melalui upah. Upah minimum provinsi atau yang biasa disingkat UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. UMP untuk setiap kabupaten/kota di suatu provinsi sama. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Menurut Kuncoro (2000:107), kemiskinan terjadi akibat adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia. Dimana sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, pada gilirannya upah juga rendah. Untuk meningkatkan produktivitasnya pendidikan dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi ketinggalan dan keterbelakangan suatu daerah. Tingginya pendapatan akan meningkatkan konsumsi mereka, dan dapat terhindar dari kemiskinan.

Rata-rata upah minimum provinsi setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Laju terbesar terjadi pada tahun 2014 yakni 22,17 persen. Pada tahun 2015, upah minimum provinsi meningkat, akan tetapi kemiskinan pada tahun ini juga mengalami peningkatan. Hal ini bertentangan dengan teori yang ada, yakni ketika upah meningkat, maka akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan menyebabkan kemiskinan menurun. Penyebab hal ini terjadi yaitu karena untuk meningkatkan hasil produk industry lebih memilih menggunakan teknologi yang menyebabkan sedikitnya pertumbuhan akan tenaga kerja. Ini ciri utama yang menyebabkan pengangguran meningkat, dan kemiskinan juga meningkat. (Berita satu, 6 Januari 2016).

Kenaikan upah minimum bertujuan untuk memenuhi kehidupan yang layak untuk masyarakat dan juga agar konsumsi masyarakat meningkat. Konsumsi masyarakat yang meningkat akan mendorong munculnya jenis-jenis usaha baru. Dimana ini akan berpengaruh terhadap penurunan pengangguran dan kemiskinan akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 2017 peningkatan rata-rata upah minimum provinsi hanya sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni 3,74 persen.

Selain upah minimum provinsi, pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk juga diduga sebagai penyebab kemiskinan. Rata-rata lama sekolah di

Indonesia selalu mengalami peningkatan. Sedangkan laju rata-rata lama sekolah mengalami fluktuasi. Laju terbesar terjadi pada tahun 2017 yakni meningkat sebesar 1,89 persen. Sedangkan laju terendah terjadi pada tahun 2013 yakni hanya meningkat sebesar 0,26 persen. (Kompas, 8 November 2011).

Kesehatan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Angka harapan hidup penduduk di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Dimana laju tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 0,29 persen. Hal ini disebabkan oleh penduduk Indonesia yang mulai memperhatikan kesehatan seperti menjaga makanan yang sehat, berolahraga serta menghindari kebiasaan yang dapat menimbulkan penyakit. Kenaikan pada angka harapan hidup ini merupakan dampak dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

TINJAUAN LITERATUR

Supriatna (1997:90) berpendapat bahwa kemiskinan adalah keadaan yang tidak dapat tercukupi oleh seseorang yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Penduduk dapat dikatakan miskin apabila tingkat pendidikannya rendah, kurangnya produktivitas bekerja, pendapatan yang rendah, kesehatan serta gizi, dan kesejahteraan hidupnya yang tidak terpenuhi, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari keterbatasan sumber daya manusia yang ada, dapat dilihat dari terbatasnya kualitas pendidikan formal maupun nonformal sehingga menyebabkan rendahnya pendidikan informal.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. (Suryawati, 2004) mengemukakan keempat bentuk kemiskinan yaitu: Kemiskinan Absolut, Kemiskinan Relatif, Kemiskinan Kultural, dan Kemiskinan Struktural.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Samuelson dan Nordhaus (1997), penduduk miskin dinegara yang berpenghasilan rendah disebabkan oleh dua hal pokok yaitu rendahnya tingkat kesehatan dan gizi, dan perbaikan mutu pendidikan yang lambat. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya melakukan pemberantasan penyakit, perbaikan kesehatan dan gizi, perbaikan mutu pendidikan, pemberantasan buta huruf dan peningkatan keterampilan penduduknya, kelima hal itu adalah suatu upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM).

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang berkaitan erat dengan kemiskinan, maka sangat diperlukan modal untuk dapat membangun sumber daya manusia tersebut agar tidak termasuk dalam lingkaran kemiskinan. Perbaikan SDM adalah dalam sektor pendidikan, kesehatan dan gizi yang merupakan kebijakan penting dalam strategi yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan.

Upah dan Kemiskinan

Upaya yang dilakukan untuk mengangkat derajat penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatan yang rendah adalah dengan menggunakan kebijakan Upah minimum (Kaufman, 2000).

Pendidikan dan Kemiskinan

Pendidikan memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Dimana saat pendidikan seseorang tinggi, orang tersebut akan memiliki tingkat

kemampuan untuk bekerja yang lebih baik. Pada akhirnya pekerjaan yang baik tersebut akan meningkatkan pendapatan yang diterima seseorang. Tingginya pendapatan akan mampu meningkatkan konsumsi masyarakat dan tidak tergolong miskin.

Menurut penelitian yang dilakukan Jundi (2014) tingginya pendidikan yang dimiliki akan meningkatkan kemampuan dan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dan pekerjaan yang lebih baik sehingga akan terhindar dari kemiskinan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh seorang individu, maka keahlian serta pemahaman akan meningkat juga sehingga menyebabkan peningkatan produktivitas individu tersebut.

Kesehatan dan Kemiskinan

Kesehatan menjadi ukuran kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat berhubungan dengan kualitas kehidupannya. Keadaan penduduk yang sehat menjadi salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan bangsa karena dengan penduduk yang sehat, harapannya pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

Angka Harapan Hidup (AHH) ialah alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup menjelaskan umur rata-rata yang dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah menunjukkan belum berhasilnya pembangunan kesehatan, dan semakin tinggi AHH menunjukkan semakin berhasil pembangun kesehatan di daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Arsyad (2016) menjelaskan intervensi untuk memperbaiki kesehatan dari pemerintah juga merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu faktor yang menjadi dasar kebijakan ini adalah perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas golongan miskin: kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Oleh karena, itu kesehatan yang baik akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif dan asosiatif dengan menggunakan variabel independen yaitu upah minimum provinsi, pendidikan, kesehatan, dan variabel dependen yaitu kemiskinan. Dalam penelitian ini dibahas seberapa besar pengaruh variabel bebas dan terikat dengan menggunakan analisis regresi panel dan menggunakan metode Fixed Effect Model. Dimana kemiskinan sebagai variabel dependen dan upah minimum provinsi, pendidikan, serta kesehatan sebagai variabel independen.

Model yang digunakan dalam analisis penelitian ini logaritma dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Log}(Y_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \text{Log}X_{1it} + \beta_2 \text{Log}(X_{2it}) + \beta_3 \text{Log}(X_{3it}) + U_{it} \quad (1)$$

Dimana β = Koefisien regresi variabel dependen, Y_{it} = Kemiskinan, X_{1it} = Upah Minimum Provinsi, X_{2it} = Pendidikan, X_{3it} = Kesehatan, U_{it} = *Error Term*, i = Cross Section, t = *Time Series*, \log = *Logaritma*.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil semua uji yang dilakukan, pada uji asumsi klasik tidak ditemukan masalah.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji f untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Selanjutnya dilakukan uji t untuk mengetahui apakah ada pada model regresi variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel terikat secara signifikan dengan membandingkan t -hitung dengan t -tabel.

Defenisi Operasional

Dalam penelitian yang dilakukan terdapat definisi operasional yaitu (1) Kemiskinan ialah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk kebutuhan sandang dan pangan dan dilihat dari sisi pengeluaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penduduk miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak menurut 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2012-2017 dan satuan yang digunakan adalah dalam juta jiwa. (2) Upah minimum provinsi adalah suatu standar minimum pendapatan yang diterima pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang diberikan dari sektor dunia kerja. Indikator yang digunakan adalah data upah minimum provinsi untuk memenuhi kebutuhan hidup layak menurut 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2012-2017 dan satuan yang digunakan adalah dalam Rupiah. (3) Pendidikan (variabel independen) adalah suatu proses pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki pemahaman. Data yang digunakan adalah data rata-rata lama sekolah usia 15 tahun keatas menurut 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2012-2017 dan satuan yang digunakan adalah dalam Tahun. (4) Kesehatan (variabel independen) adalah sebuah kondisi yang stabil dalam sistem koordinasi badan dan jiwa raga manusia yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data angka harapan hidup saat lahir masyarakat menurut 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2012-2017 dan satuan yang digunakan adalah dalam Tahun.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menguji tentang pengaruh upah minimum provinsi, pendidikan, dan kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia. Dari hasil pengujian persamaan dengan menggunakan aplikasi Eviews8 dapat terlihat bagaimana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Sehingga dari hubungan antar variabel tersebut dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 15,33096 + 0,094621X_1 - 0,962898X_2 - 2,032890X_3 \quad (2)$$

Berdasarkan hasil penelitian, persamaan menunjukkan upah minimum provinsi (X1) berpengaruh positif terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 0,094621. Ketika upah minimum provinsi naik satu persen maka kemiskinan akan naik sebesar 0,094621 persen dengan asumsi ceteris paribus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pendidikan (X2) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar -0,962898.

Tabel 1. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)

Method: Panel Least Squares

Sample: 2012 2017

Periods included: 6

Cross-sections included: 34

Total panel (unbalanced) observations: 201

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.33096	8.684455	1.765333	0.0794
LOG(UMP)	0.094621	0.040449	2.339257	0.0205
LOG(PENDIDIKAN)	-0.962898	0.374523	-2.570999	0.0110
LOG(KESEHATAN)	-2.032890	2.161591	-0.940460	0.3484

Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.998164	Mean dependent var	6.074561	
Adjusted R-squared	0.997761	S.D. dependent var	1.083016	
S.E. of regression	0.051242	Akaike info criterion	-2.939790	
Sum squared resid	0.430624	Schwarz criterion	-2.331718	
Log likelihood	332.4488	Hannan-Quinn criter.	-2.693738	
F-statistic	2477.111	Durbin-Watson stat	1.948121	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olahan Data Eviews8, 2019

Koefisien Determinasi

Nilai R-squared sebesar 0,998164. Hal ini berarti sebesar 99% kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya yaitu upah minimum provinsi, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan sisanya 1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model atau tidak dimasukkan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis data, dinyatakan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia kurun waktu 2012-2017 dengan koefisien regresinya sebesar 0,09. Hal ini berarti apabila upah minimum meningkat satu persen maka akan meningkatkan kemiskinan di Indonesia sebesar 0,09. Kemiskinan dalam penelitian ini menggunakan data

jumlah penduduk miskin yang dinyatakan dalam jiwa dari tahun 2012 sampai dengan 2017.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peningkatan pada upah minimum provinsi tidak selalu diiringi oleh penurunan angka kemiskinan. Hal ini mungkin disebabkan oleh fenomena yang memperlihatkan bahwa peningkatan pada upah minimum cenderung diikuti oleh terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK pada gilirannya akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran. Hal ini tentunya akan meningkatkan angka kemiskinan.

Pada perusahaan besar yang sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih, penggunaan teknologi akan lebih efektif daripada memberikan kenaikan upah pada tenaga kerja. Saat upah mengalami peningkatan, perusahaan cenderung akan mengurangi tenaga kerja dan lebih menggunakan teknologi yang canggih. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya pengangguran, sehingga kemiskinan bukan teratasi melainkan kemiskinan akan meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ramirez, dkk (2015) yang juga menemukan bahwa upah minimum memiliki hubungan yang positif terhadap kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dari model ekonomi makro, dimana kenaikan upah minimum mengarah ke peningkatan tingkat pengangguran. Kenaikan tingkat pengangguran ini dapat dikaitkan dengan kenaikan pada upah minimum yang akan meningkatkan kemiskinan, sehingga kurangnya dampak upah minimum pada kemiskinan.

Sutikno, dkk (2019) juga menemukan bahwa upah minimum provinsi memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Menurut peneliti, kenaikan pada upah tidak selalu diikuti oleh penurunan pada tingkat kemiskinan.

Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan hasil analisis data, dinyatakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan koefisien regresi $-0,96$. Hal ini berarti apabila pendidikan meningkat satu persen maka akan menurunkan kemiskinan di Indonesia sebesar $0,96$ persen.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan sebagai proses budaya akan tumbuh dan berkembang menjadi nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Melalui pendidikan, seseorang akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman. Tingginya tingkat pendidikan akan meningkatkan ilmu pengetahuan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, dapat meningkatkan produktifitas seseorang untuk mendapat pekerjaan yang bagus. Hal ini tentu akan menguntungkan seseorang dengan mengharapkan pendapatan yang didapat juga akan lebih tinggi. Saat pendapatan seseorang tinggi, tentunya akan dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak supaya terhindar dari kemiskinan.

Kurnia Dwi (2017) dalam penelitian juga menemukan bahwa Pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan di DIY. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan mengurangi kemiskinan. Karena dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan menghasilkan produktifitas yang tinggi.

Pengaruh Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia

Kesehatan merupakan gambaran tingkat kesejahteraan seseorang dengan melihat kualitas kehidupannya. Kesehatan seseorang merupakan hal yang penting, karena tingkat kesehatan merupakan modal bagi seseorang untuk mendapat pekerjaan yang layak selain dari kemampuan dan skill yang dimilikinya. Tingginya tingkat kesehatan akan menyebabkan produktifitas seseorang akan meningkat. Hal ini juga berpengaruh pada pendapatan yang akan diterimanya. Pendapatan yang tinggi dapat mengakibatkan seseorang mampu meningkatkan konsumsi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menurunkan angka kemiskinan.

Namun secara statistik, kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Penyebab tidak signifikannya kesehatan terhadap kemiskinan ialah, angka harapan hidup tidak menjamin seseorang dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan pendapatan yang tinggi. Kesehatan seseorang tidak hanya diukur melalui angka harapan hidup. Saat seseorang yang termasuk dalam usia bekerja, namun memiliki penyakit sehingga tidak bisa bekerja akan menjadi faktor sulitnya mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga angka harapan hidup tidak bisa menjamin menurunnya angka kemiskinan.

Wongdesmiwati (2009) juga menemukan bahwa variabel angka harapan hidup tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penduduk miskin. Hal ini disebabkan oleh tidak berpengaruhnya angka harapan hidup terhadap penduduk miskin, berbeda dengan angka melek huruf yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Model Panel menggunakan Fixed Effect Model dan pembahasan terhadap hasil penelitian antara variabel bebas terhadap variabel terikat seperti yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, (2) Pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, dan (3) Kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. (4) Upah minimum provinsi, pendidikan, dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Akhirmen. 2004. *Statistik 1*. Padang: UNP.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Astuti, Restu Ratri. 2015. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2004-2012". Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2008). *Konsep Kemiskinan*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2018). *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi-Provinsi di Indonesia (2007-2017)*. Jakarta.

- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2018). Upah Minimum Provinsi di Indonesia (2012-2017). Jakarta.
- Berita Satu. 2016. Ekonomi: Ini Penyebab Angka Kemiskinan RI Meningkat. Diunduh 6 Januari 2016. Tersedia pada <https://www.beritasatu.com/ekonomi/338515/ini-penyebab-angka-kemiskinan-ri-meningkat>
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Detik Finance. 2018. Ekonomi Bisnis: Kepala Bappenas Beberkan Penyebab Angka Kemiskinan Turun. Diunduh 17 Juli 2018. Tersedia pada <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4119919/kepala-bappenas-beberkan-penyebab-angka-kemiskinan-turun>.
- Dwi, Kurnia. 2017. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di DIY Periode 2006-2013". Indonesia.
- Ekananda, M (2016). Analisis Ekonometrika Data Panel. Mitra Wacana Medis: Jakarta.
- Gujarati, Damodar N (2010). Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Jhingan, M. L. 2012. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Rajawali Press.
- Kauffman, J. M., 2000. "Should you take aspirin to prevent heart attack". Journal of Scientific Exploration, Vol. 14, No. 4, pp. 623-641.
- Kompas. 2016. Pertumbuhan Ekonomi 2015 Terendah dalam Enam Tahun Terakhir. Diunduh 7 Februari 2016. Tersedia pada <https://money.kompas.com/read/2016/02/07/182803626/Pertumbuhan.Ekonomi.2015.Terendah.dalam.Enam.Tahun.Terakhir>
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kuncoro. 2002. Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Erlangga : Jakarta.
- _____. 2006. Ekonomi Pembangunan. Jakarta : Salemba Empat.
- Kurniawati, Ardhan dkk (2017). "Dampak Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2006-2014". Indonesia.
- Mills, A and Gilson, L. 1990. *Ekonomi Kesehatan untuk Negara-negara sedang Berkembang*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Musa, Al, Jundi. 2014. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi Di Indonesia". Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang. Dipublikasikan.
- Pramesti, Nyoman Ayu. 2018. "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali". Indonesia.
- Ramirez, Carlos dkk (2015). "The Effect Of Minimum Wage On Poverty". Washington.
- Samuelson, Paul A & William D Nordhaus. 1997. *Mikroekonomi*. Jakarta: Erlangga.

- Sukirno, Sadono. 2008. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Humaniora Utama. Bandung.
- Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy.
- Sutikno, Rizky Yulita, dkk. 2019. "Pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara". Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan. Indonesia.
- Wahyu, Elda dkk. 2018. "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur". Indonesia.
- Winarno, Wing Wahyu. (2009). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Wongdesmiwati. 2009. "Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Tahun 1990-2004: Analisis Ekonometrika". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Indonesia.